

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Andi Pangerang Moenta dan Syafaat Anugrah Pradana. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. PT. RajaGrafindo Persada. Depok.
- Afan Gaffar. 2009. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Abdul Wahab solichin. 1997. *Analisis kebijaksanaan, dari Formulasi Ke implementasi kebijaksanaan Negara*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Abdul Aziz. 2008. *Ekonomi Islam Analisis Mikro dan Makro*. Graha Ilmu. Yogyakarta. Cet. Ke-1.
- Abd. Rais Asmar. 2015. *Kedudukan Gubernur dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jurnal Jurisprudence. Vol. 2 No. 2.
- Awan Y. Abdoellah dan Yudi Rusfiana. 2016. *Teori Analisis Kebijakan Publik*. CV Alfabeta.
- Azmi Fendri. 2016. *Pengaturan kewenangan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pemanfaatan sumberdaya mineral dan batu bara*. PT Raja grafindo. Jakarta.
- Budi winarno. 2002. *teori dan proses kebijakan public*. media pressindo. Yogyakarta.
- Dessy Anwar. 2001. *Kamus Bahasa Indonesia*. Karya Abditama. Surabaya. Cet. Ke-1.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2018. *Metode Penelitian Hukum : Langkah-langkah untuk Menemukan Kebenaran dalam Ilmu Hukum*. PT Rafika Aditama. Bandung.
- Hanifa Harsano. 2002. *Implementasi kebijakan dan politik*. Grafindo. Jakarta
- Lupiyoadi. 2001. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta. Salemba Empat. Jakarta.
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.

- Nuryanti Mustari. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik “Formulasi, implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik”*. PT Leutika Nouvalitera.
- Ridwan HR. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Rusadi Kantaprawira. 1998. *“Hukum dan Kekuasaan”*. Makalah, Universitas Islam Indonesia. Jogjakarta.
- Soerjono Soekanto, 2018, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, hlm. 11
- Solichin Abdul Wahab. *Konteks analisis kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan edisi ke2*. Bumi Aksara. Jakarta.
- Stout HD. de Betekenissen van de wet. 2004. *dalam Irfan Fachruddin, Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*. Alumni Bandung.
- Suteki dan Galang Taufani. 2018. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*. Rajawali Pers. Depok.
- Taufiqurakhman. 2014. *Kebijakan publik pendelegasian tanggung jawab negara kepada presiden selaku penyelenggara pemerintahan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama.
- Wawan Adi Subakdo dan Yuwono Ario Nugroho. 2016. *In-Bound pada Out bound logistic pada pendistribusian Ipj 3 kg di Indonesia*. Politeknik ATI Makassar.

**Jurnal:**

- Fitria Y. Alim. 2018. *Implementasi kebijakan konversi minyak tanah ke liquefied petroleum gas (lpg) di kecamatan Poso pesisir selatan kabupaten Poso*. Volume : 11 Nomor : 1 Edisi : September.
- Haedar Akib. *“Implementasi Kebijakan Apa Mengapa, dan Bagaimana”*. Jurnal Administrasi Publik. Fakultas Ilmu Administrasi Negara UNM. Vol. 1. Nomor 1 Thn. 2010.
- Gusman Tatawu dan Kamariddin Jafar. *Analisis Peraturan Gubernur Tanpa Dasar Peraturan Daerah dalam Penyelenggaraan Otonomi*

Daerah. Jurnal Halu Oleo Legal Researc, Vol. 1. 3 Desember 2019.

R. Agus Abikusna. 2019. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Jurnal Sosfilkom, Iain Syekh Nurjati Cirebon. vol. III. nomor 01. Januari-Juni 2019.

**Website:**

<https://www.esdm.go.id/id/media-center/arsip>

Winardi. 1989. Saluran Distribusi. <https://dansite.wordpress.com> (diakses 20 Oktober 2015).

<https://www.pertamina.com/id/news-room/energia-news/pertamina-dan-disperindag-bersinergi-sosialisasikan-mekanisme-penyaluran-lpg-3-kg>

<https://primalifejournal.wordpress.com/2013/02/25/implementasi-kebijakan-publik-2/>

[https://www.academia.edu/5708875/TEORI\\_KEWENANGAN](https://www.academia.edu/5708875/TEORI_KEWENANGAN)

<https://jdih.babelprov.go.id/content/dasar-pembentukan-peraturan-gubernur>

<http://www.pertagas.pertamina.com/Portal/Page/Read/about-us>

<https://www.pertamina.com/id/siapa-kami>

<https://migas.esdm.go.id/uploads/post/juni20/daftar-penyalur/Penyalur-LPG-Pertamina-Juni-2020.pdf>

<https://karindagrup.com>2018/07/22>info-spbe>

**Perundang-undangan:**

UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Peraturan Presiden nomor 104 Tahun 2007 Tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Sumber Daya Alam dan Mineral No 29 Tahun 2009  
Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum  
Gas.

## LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN BONE  
SEKRETARIAT DPRD KAB. BONE

Jl. Kompleks Stadion Lapatau Watampone Telp. (0481) 21015

**SURAT KETERANGAN PENELITIAN**


NOMOR : 370/175/XI/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini Sekretaris Dewan Kab. Bone menerangkan bahwa :

**Nama** : KRISDA DAMAYANTI  
**Nomor Pokok** : B021171025  
**Fakultas** : Hukum  
**Program Studi** : Hukum Administrasi Negara

Adalah benar-benar melakukan penelitian di Kantor Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terhitung sejak tanggal 25 Oktober s/d 25 November 2022 dalam rangka melengkapi skripsi penelitian dengan judul "*Implementasi Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Pedoman Penetapan Harga Eceran Tertinggi (HET) Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kg*"

Demikian Surat Keterangan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan : Watampone  
Pada Tanggal : 6 November 2022  
Pj. SEKRETARIS DEWAN,  
  
**A. ALIMUDDIN M. S.Sos**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP. 10631004 198410 1

Scanned by TapScanner